



editorial

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DEMI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Permasalahan kualitas sumber daya manusia saat ini menjadi hal yang krusial yang dihadapi negara dalam menjawab tantangan arus globalisasi yang semakin cepat. Kualitas sumber daya suatu negara yang mumpuni direpresentasikan melalui pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang menggambarkan ketercapaian masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dalam laporan Badan Pusat Statistik tahun 2017 mencatat, bahwa indeks Pembangunan manusia di Indonesia yang mengalami kenaikan sebanyak 0,63 poin menjadi 70,81 masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, Brunei dan Malaysia. Hal ini juga menjadi tugas bagi kita semua para PNS dalam menjawab tantangan persaingan global yang kian meningkat.

Di sisi lain, yang menjadi salah satu elemen Reformasi Birokrasi adalah tuntutan adanya perubahan pada penataan sistem manajemen ASN. Menurut beberapa referensi dan penelitian terdahulu, isu pengembangan kompetensi aparatur pemerintah adalah persoalan yang kompleks yang masih dihadapi. Beberapa faktor penyebabnya adalah, kurangnya komitmen pimpinan, belum adanya standar yang bisa menjadi acuan dalam pengukuran kompetensi jabatan, dan pemerintah daerah yang cenderung mengabaikan faktor kompetensi dalam pengangkatan pegawai. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi Aparatur pemerintah setempat.

Ditambah lagi, hasil penerapan desentralisasi tujuh belas tahun yang lalu, menurut laporan *World Bank*, Indonesia pada dimensi tertentu telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, kecuali dalam hal kesenjangan dan pengawasan publik. Indikator yang menunjukkan hasil yang memuaskan adalah pada segi penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti akses air bersih, lingkungan dan sanitasi yang cukup

iii

memadai, partisipasi pendidikan baik sekolah pertama dan atas, serta keterlibatan badan profesional dalam proses kelahiran (Susenas dan *World Bank* 2017). Sejak awal periode diterapkannya desentralisasi, perkembangan tersebut terus menunjukkan angka yang positif, seiring dengan hasil yang menunjukkan bahwa disparitas antar daerah terhadap akses kebutuhan dasar relatif menurun.

Meskipun demikian, pemerintah tetap memiliki pekerjaan rumah yang besar yang perlu diselesaikan, terutama dari segi pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, termasuk kinerja para PNS baik di daerah maupun pusat dan perangkat daerah yang perlu ditingkatkan secara menyeluruh dan terpadu. Peningkatan kinerja dan kualitas Sumber daya manusia ini perlu melalui penerapan beberapa startegi, salah satunya di level kebijakan.

Tugas dan tantangan pemerintah lainnya adalah pengimplementasian aktivitas kebijakan yang telah ditetapkan undang undang dan telah menjadi kesepakatan beberapa pihak, seperti aktor pelaksana kebijakan, organisasi dan para stakeholders yang terkait. Untuk itu, Jurnal transformasi kali ini mencoba mengangkat isu-isu kebijakan publik yang menjadi *trending topic*, yaitu berkaitan dengan isu kebijakan penetapan penguasaan tanah di kawasan perbatasan, dan optimalisasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Banda Aceh.

Selain isu pengembangan sumber daya manusia, kebijakan publik, disparitas antar daerah masih menjadi isu yang hangat. Penyebabnya adalah kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar yang belum memadai. Tentu saja hal ini berkontribusi pada semakin lebarnya kesenjangan antar wilayah yang menghambat produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Merujuk pada pembahasan dalam *Indonesia Development Forum*, untuk itulah perlunya strategi yang mengarah pada identifikasi karakteristik wilayah tertentu, seperti: pembangunan di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi lokal, serta pembangunan wilayah yang berfokus pada pembangunan daerah tertinggal. Strategi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi bagi isu pembangunan antar daerah dalam usaha pengentasan kemiskinan, sesuai dengan prioritas pembangunan 2018 yang disampaikan oleh Presiden.

Berdasarkan fenomena dan penjabaran di atas, semoga penerapan kebijakan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia dapat diwujudkan dengan terukur dan terarah, menuju Indonesia yang lebih maju sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Zulkarnain